

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja,

dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

Capaian kinerja untuk indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 100%, tercapai 105.27% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 % atau tercapai sebesar 105.27%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran	1.44%
Nilai Anggaran	Rp. 897.217.400
Capaian 2024	105.27%
Target	95%
Realisasi	100%

b. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

Capaian kinerja untuk indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 800 realisasi sebesar 754.13, tercapai 94.26% atau bernilai kinerja $76 \leq 90$ (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 754.13 atau tercapai sebesar 100.5%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 94.26%.

Efisiensi Anggaran	1.13%
Nilai Anggaran	Rp. 267.897.944
Capaian 2024	94.26%
Target	800
Realisasi	754.13

c. Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Capaian kinerja untuk indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 820 realisasi sebesar 615, tercapai 75% atau bernilai kinerja $66 \leq 75$ (sedang). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 615 atau tercapai sebesar 75.93%, maka capaian tahun 2024 menurun 75%.

Efisiensi Anggaran	1.13%
Nilai Anggaran	Rp. 749.449.500
Capaian 2024	75%
Target	820
Realisasi	615

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

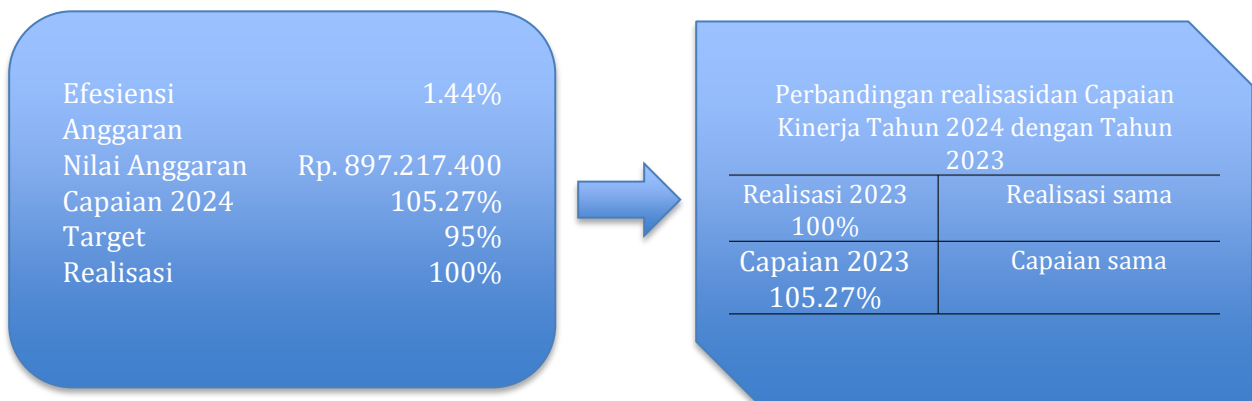
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dst	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar		95%	95%	95%		105.27%	105.27%	105.27%		100%	100%	100%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak		700	750	800		703.5	754.13	754.13		105.3%	100.5%	94.26%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		3187	810	820		3862.5	615	615		121.5%	75.93%	75%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

9. a. Pada tahun 2022 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar dengan target pada tahun 2022 adalah 95% berasal dari perhitungan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dibagi dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di UPT PPA dikali 100%.

- b. Pada tahun 2023 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar dengan target pada tahun 2023 adalah 95%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 105.27%

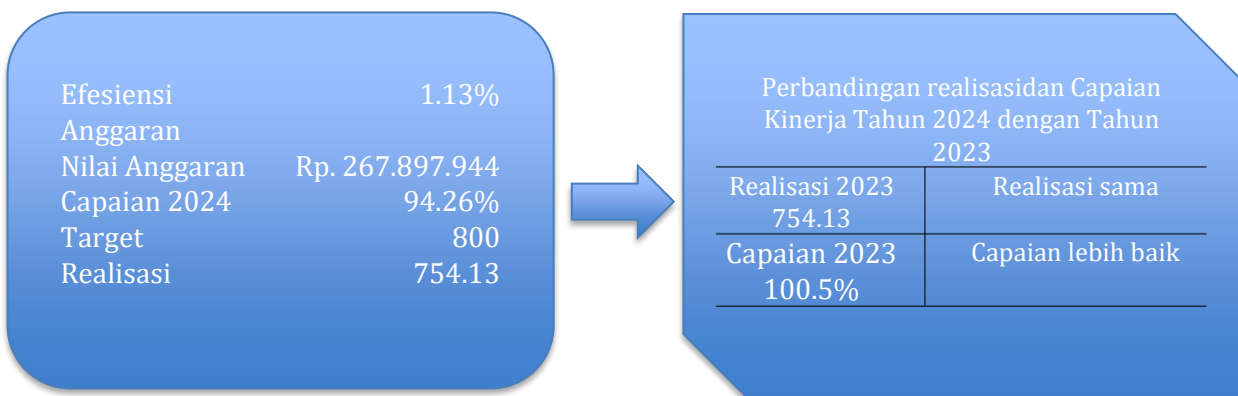
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 95% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian 28 orang pada data kasus kekerasan pada perempuan, dan 109 orang pada data kasus kekerasan pada anak. Dengan demikian total kasus pada perempuan dan anak 137 dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 137 orang dan capaian kinerja sebesar 105.27%



2 a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Skor Pencapaian Kota Layanan Anak dengan target pada tahun 2022 adalah 700 berasal dari perhitungan Skor verifikasi administrasi dibagi dengan Skor evaluasi mandiri.

b. Pada tahun 2023 Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak dengan target skor pada tahun 2023 adalah 750. Realisasi pada tahun 2023 adalah 754.13 dengan capaian 100.5%

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 800 dan realisasinya adalah 754.13 dan capaian kinerja sebesar 94.26%. Skor capaian kota layak anak pada tahun 2024 masih pada skor yang sama dengan tahun 2023, karena skor capaian kota layak anak tahun 2024 belum dapat diperoleh.

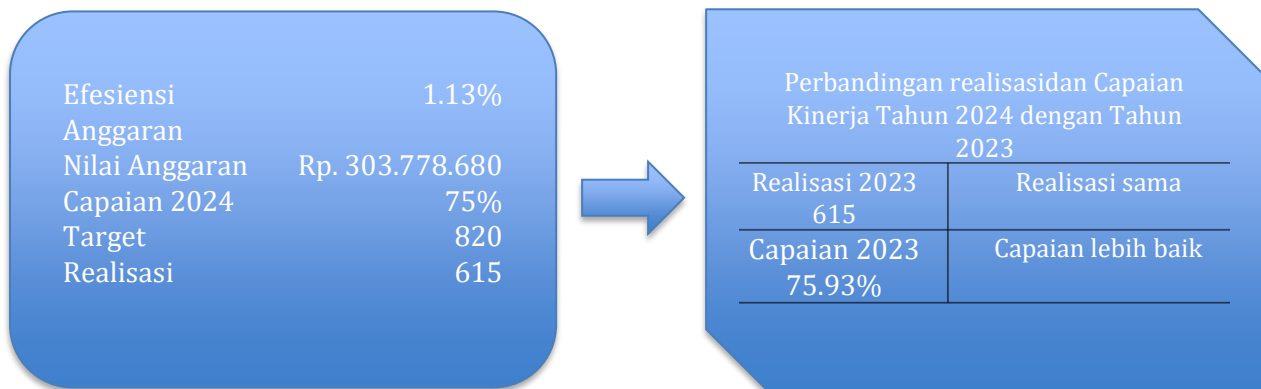


3 a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan target pada tahun 2022 adalah 3187 berasal dari perhitungan nilai dimensi prasyarat ditambah nilai dimensi pelaksanaan dibagi dua.

b. Pada tahun 2023 Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan target skor pada tahun 2023 adalah 810. Dengan adanya perubahan cara perhitungan evaluasi pada Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menyebabkan terjadinya penurunan skor target. Realisasi pada tahun 2023 adalah 615 dengan capaian 75.93%

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 820 dan realisasinya adalah 615 dan capaian kinerja sebesar 75%. Skor capaian anugerah parahita ekapraya (APE)

pada tahun 2024 masih pada skor yang sama dengan tahun 2023, karena skor capaian anugerah parahita ekapraya (APE) tahun 2024 belum dapat diperoleh.

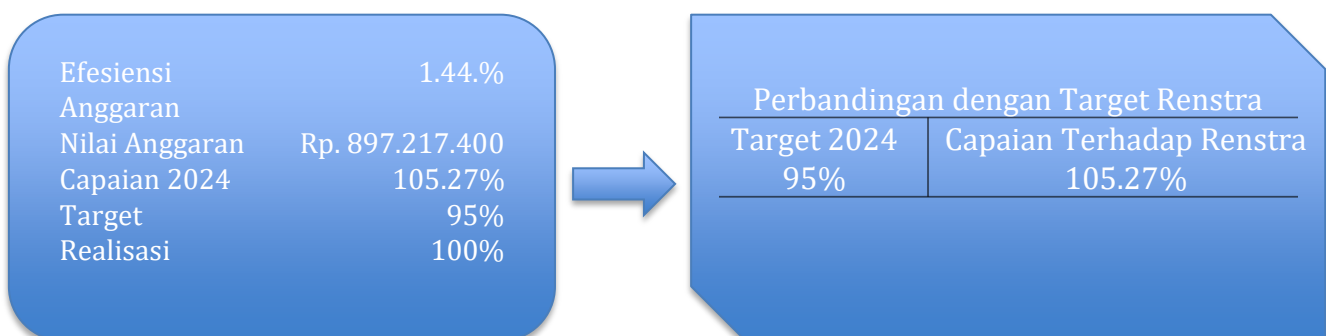


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

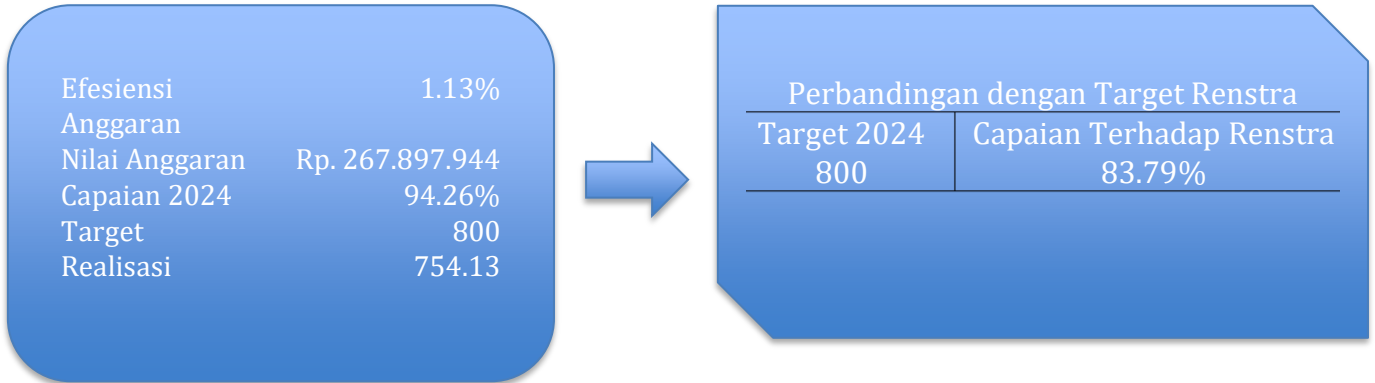
a. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 105.27% dari target Renstra sebesar 95% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.



b. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 83.79% poin dari target Renstra sebesar 900 poin dan terealisasi 754.13 pada tahun 2024.



c. Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Skor Pencapaian Anugerah Ekapraya (APE) tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 73.21% dari target Renstra sebesar 840 poin dan terealisasi 615 poin pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana table 3.3 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	100%	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	754.13	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	615	-	Tidak ada

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 100%, tercapai 105.27% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 105.27%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 105.27%
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Terealisasinya seluruh kegiatan pada program-program pendukung capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu

sesuai standar.

- Terlayani nya seluruh korban perempuan dan anak pada kasus kekerasan yang masuk di UPT PPA.
 - Terlaksananya pendampingan kasus, kegiatan gelar kasus dan penjangkauan korban oleh UPT PPA.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar adalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya jumlah SDM UPT PPA yang tersedia dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
 - Masih kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis satgas peduli perempuan dan anak dalam hal penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan jumlah SDM UPT PPA yang berkompeten
 - Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada satgas peduli perempuan dan anak yang ada di kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas PPPA Kota Dumai dalam hal penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak
 - Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal penjangkauan, pemantauan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 800 realisasi sebesar 754.13, tercapai 94.26% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 754.13 atau tercapai sebesar 100.5%, maka capaian tahun 2024 menurun

sebesar 94.26%

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Skor Pencapaian Kota Layak Anak kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Terealisasinya seluruh kegiatan pada program-program pendukung capaian indikator skor pencapaian kota layak anak
 - Terlaksananya kegiatan yang menjadi syarat terpenuhinya pencapaian kota layak anak
 - Terlaksananya kerjasama dengan beberapa perangkat daerah atau lintas sektor terkait pencapaian dumai kota layak anak.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Skor Pencapaian Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya komitmen beberapa perangkat daerah dalam pencapaian Dumai sebagai kota layak anak.
 - Masih rendahnya peraturan daerah tentang kota layak anak.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Skor Pencapaian Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pencapaian Dumai sebagai kota layak anak;
 - Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak anak;
 - Meningkatkan advokasi kepada perangkat daerah dalam memberikan inovasi pengembangan kegiatan;
 - Melakukan advokasi kepada kepala daerah kota dumai dan DPRD untuk terwujudnya perda kota layak anak

3. Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 820 realisasi sebesar 615, tercapai 75% atau bernilai kinerja $76 \leq 90$ (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 615 atau tercapai sebesar 75.93%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 94.26%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Terealisasinya seluruh kegiatan pada program-program pendukung capaian indikator skor pencapaian kota layak anak.
 - Terlaksananya kegiatan yang menjadi syarat terpenuhinya pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
 - Terlaksananya kerjasama dengan beberapa perangkat daerah atau lintas sektor terkait pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai berikut:
- Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).
 - Kurangnya media informasi terkait pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
 - Memperkuat kerjasama tim dalam hal penyebaran informasi tentang perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	40	100	%	444.527.000	392.402.900	88.27
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	60	100	%	452.690.400	259.567.572	57.33
2	Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Tercapainya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	80	99.5	%	232.940.844	193.804.489	83.19
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Menurunnya Perkawinan Usia Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga	90	100	%	34.957.100	28.872.500	82.59
3	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	20	83.71	%	549.449.500	314.389.496	57.21
		Tersedianya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpisah Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40	100	%	200.000.000	150.933.301	75.46

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	105.27	72.8
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	754.13	82.89
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	615	66.33

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar* tingkat efisiensinya adalah 1.44% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (105.27%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (72.8%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Skor Pencapaian Kota Layak Anak* tingkat efisiensinya adalah 1.13 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (94.26%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82.89%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)* tingkat efisiensinya adalah 1.13 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (75%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (66.33%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto dan screenshot gambar sebagai eviden.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kota Layak Anak	Nindya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto dan screenshot gambar sebagai eviden.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Pengarusutamaan Gender	549.449.500	376.985.096
	1 Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	190.887.300	174.018.896
	1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	85.930.600	83.915.625
	2 Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65.000.000	53.629.375
	3 Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.956.700	36.473.896
	2 Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	59.562.200	47.127.200
	1 Sub Kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, social dan ekonomi	55.000.000	43.565.000
	2 Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, social, dan ekonomi	3.562.200	3.562.200
	3 Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	300.000.00	155.839.000
	1 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	150.000.000	89.574.000
	2 Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan	150.000.000	66.265.000

		edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		
2		Program Perlindungan Perempuan	444.527.000	392.402.900
	1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	144.451.350
		1 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	120.000.000	111.551.350
		2 Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	35.000.000	32.900.000
	2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	164.527.000	147.188.000
		1 Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	45.000.000	42.500.000
		2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan	119.527.000	104.688.000
	3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	100.762.550
		1 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	60.000.000	35.769.550
		2 Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	25.000.000	24.994.000
		3 Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan	40.000.000	40.000.000

		perempuan kewenangan kabupaten/kota		
3		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	34.957.100	28.872.500
	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.957.100	28.872.500
		1 Sub Kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk kegiatan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	34.957.100	28.872.500
4		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	200.000.000	150.933.301
	1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	150.933.301
		1 Sub Kegiatan Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	72.323.500
		2 Sub Kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	78.609.801
5		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	232.940.844	193.804.489
	1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.555.444	67.494.289
		1 Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	30.000.000	28.587.400
		2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	42.555.444	38.906.889
	2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	160.385.400	126.310.200

	1	Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	119.992.500	100.008.600
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	40.392.900	26.301.600
6	Program Perlindungan Khusus Anak		452.690.400	259.567.572
	1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.555.444	67.494.289
	1	Sub Kegiatan Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	65.000.000	64.965.000
	2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.290.400	214.687.300
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	20.260.000
	2	Sub Kegiatan Koordinasi Layanan AMPK	232.290.400	192.427.300
	3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.400.000	85.208.572
	1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	125.400.000	85.208.572
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.678.802.306	5.135.201.443
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	47.354.720	34.455.920

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12.399.920	11.949.920
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.887.000	5.887.000
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.479.000	4.479.000
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	4.028.800	4.028.800
	5	Sub Kegiatan penyusunan perubahan DPA-SKPD	3.008.800	1.200.000
	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.880.600	4.840.600
	7	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	7.670.600	2.070.600
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.217.750	3.565.889.849
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.876.217.750	3.565.889.849
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.103.844	473.720.718
	1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.590.300	4.598.100
	2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.000.000	110.636.966
	3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	20.000.000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	56.000.000	46.613.700
	5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	84.999.798	79.855.300
	6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.728.000	6.440.000
	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	213.785.746	205.576.652
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.554.600	134.765.418

	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	20.000.000	19.990.418
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.554.600	0
	3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	140.000.000	114.775.000
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	916.374.874	824.104.867
	1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	174.000	170.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.216.480	94.092.377
	3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.043.674	6.682.000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	794.940.720	723.160.490
	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.196.518	102.264.671
	1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.530.000	32.000.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	68.221.000	59.827.520
	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.680.000	3.825.000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	6.055.518	6.007.151
	5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6.710.000	605.000